



RENJA 2025



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH**



KOTA SAMARINDA

BerAKHLAK  **#bangga**
melayani
bangsa



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 7), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 19);
 10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. BAB III Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V Penutup.

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
- d. *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;*
- e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
- g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
- h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
- k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
- o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
- p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:
- Sistematika dan Substansi Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
 - Hasil rangkaian penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Agustus 2024
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 500

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

Telp.(0541)733926 Fax.(0541)733986

S A M A R I N D A

Kode Pos. 75121

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : 800/2484/300.02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka persiapan dan tahapan penyusunan Renja perlu dibentuk Tim penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021/);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
27. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sebagaimana diktum KESATU adalah :
1. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan 2026 capaian Renstra SKPD;
 2. Menganalisis kinerja pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 3. Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi serta dampak terhadap pencapaian visi, misi serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 4. Mereview terhadap Rancangan Awal RKPD;
 5. Melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diperoleh dari hasil Musrenbang tahun 2025;

6. Menyusun Renja dan Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan pada Belanja Langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

KETIGA : Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 03 September 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



IBROHIM, SE, M.Si

19650502 198902 1 004

Tembusan Yth:

1. Walikota Samarinda;
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
4. BAPPEDALITBANG Kota Samarinda;

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala BPKAD	Ketua
2	Sekretaris BPKAD	Sekretaris
3	Kabid. Anggaran	Anggota
4	Kabid. Perbendahraan	Anggota
5	Kabid. Akuntansi	Anggota
6	Kabid. Aset	Anggota
7	Perencana Ahli Muda	Anggota
8	Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
10	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
11	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli	Anggota
12	Penilaian Pemerintah Ahli Muda	Anggota



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota Samarinda.

Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.



Renja BPKAD Kota Samarinda juga merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Renja BPKAD Kota Samarinda adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya.

Bagi BPKAD Kota Samarinda, Rancangan Akhir (Rankir) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyempurnakan Ranwal Renja BPKAD dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2025. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2025, RPJP Pemerintah Kota Samarinda, RPJMD Pemerintah Kota Samarinda, dan Ranwal RKPD Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Sebagai rancangan awal dokumen resmi Pemerintah Daerah, Ranwal Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Ranwal RKPD dan Ranwal Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan perangkat daerah. Sebagai rencana operasional, Ranwal RKPD merupakan pedoman awal dalam penetapan RKPD dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan RAPBD.



Selanjutnya Rankir Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renja SKPD melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah maupun Musrenbang RKPD yang kedepannya dijadikan acuan dalam penyusunan RKA SKPD dan kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.

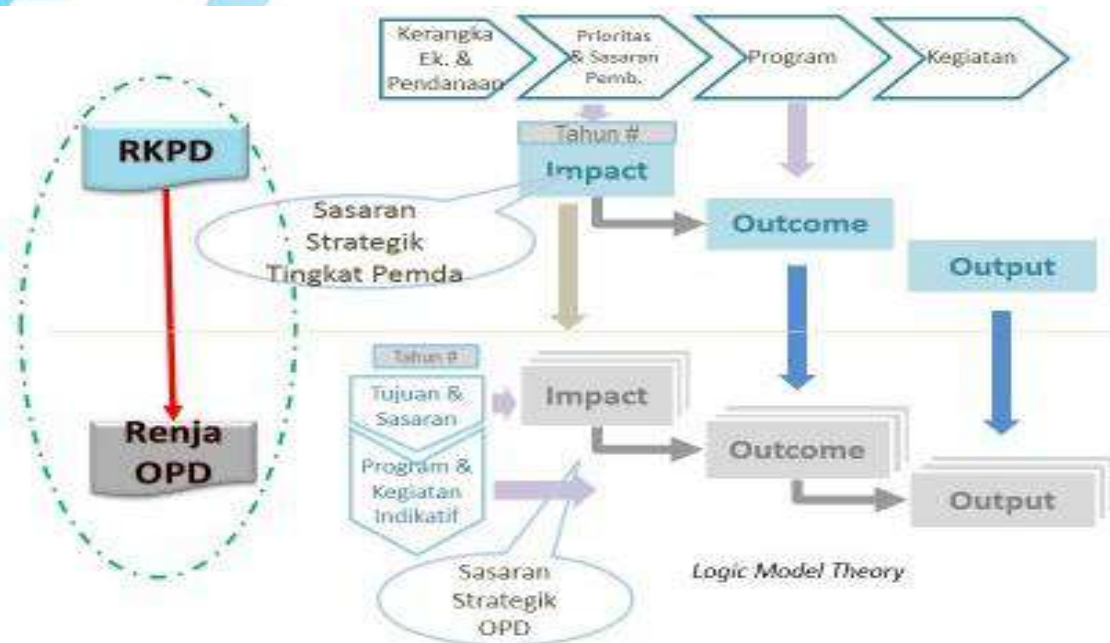
Secara terstruktur, proses penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda dapat didiskripsikan dalam bagan alur sebagai berikut:

BAGAN ALUR 1: PRINSIP TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA - OPD





BAGAN ALUR 2: KETERKAITAN RKPD DAN RENJA OPD



BAGAN ALUR 3: KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA OPD





BAGAN ALUR 4: HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN & DOKUMEN PENGANGGARAN



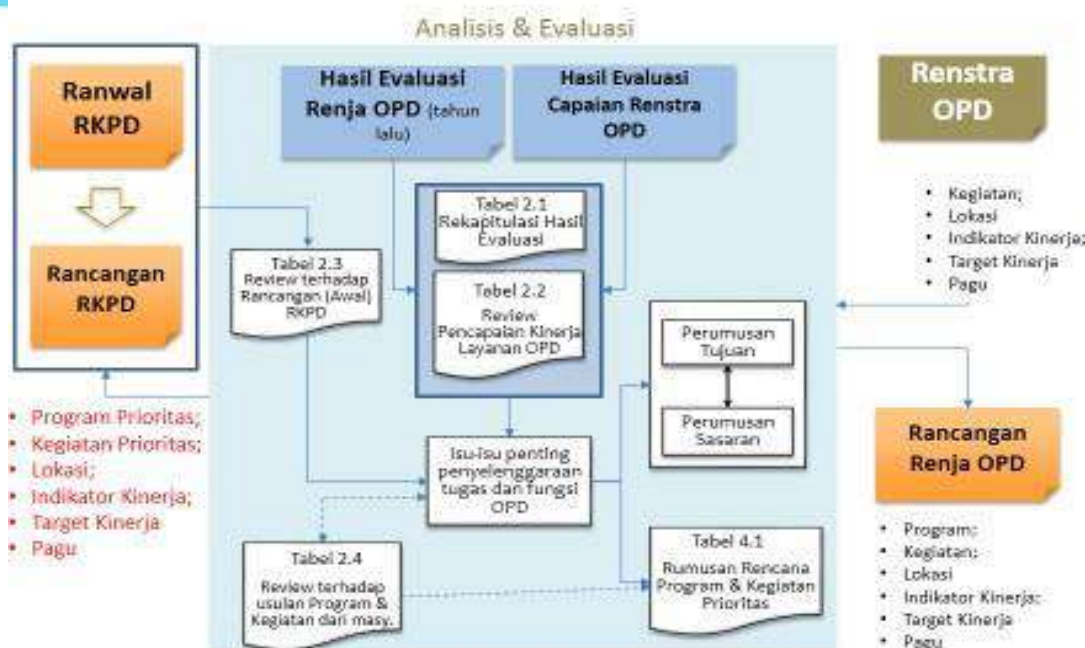
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 47 tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Startegis Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 dan Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Oraginisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda, dimana BPKAD Kota Samarinda merupakan unsur pendukung urusan keuangan yang menunjang proses pembangunan.

Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda yaitu misi ke-3: **“Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, transparan, akuntable dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat”**.

Dari hasil evaluasi Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2023 dan proyeksi capaian Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024, difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya pada efektivitas perencanaan anggaran dan pengelolaan aset daerah. Selanjutnya BPKAD Kota Samarinda merencanakan secara detail agenda tersebut di dalam dokumen ini.



BAGAN ALUR 5: PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-OPD



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;



26. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
27. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Sebagai panduan awal dalam menyusun dokumen perencanaan yang mendeskripsikan program/ kegiatan/ sub kegiatan pada BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025;
- b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 dengan mengutamakan pengaruh pada isu- isu strategis tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja pada BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 adalah:

- a. Renja menjadi pedoman awal bagi BPKAD Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya sesuai dengan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025;
- b. Renja merupakan dokumen yang berisikan program, kegiatan, dan sub kegiatan BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Rankir RKPD Kota Samarinda 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BPKAD Kota Samarinda tahun 2024 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja BPKAD Kota Samarinda, proses penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda, keterkaitan antara Renja BPKAD Kota Samarinda dengan Dokumen RKPD, Renstra BPKAD Kota Samarinda dengan Renja K/L, dan Renja Provinsi/ Kab/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran BPKAD Kota Samarinda.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renja BPKAD Kota Samarinda, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 dan Capaian Renstra BPKAD Kota Samarinda

Bab ini memuat kajian (reviuiw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Kota Samarinda tahun 2023 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Renstra BPKAD Kota Samarinda pada tahun-tahun sebelumnya, yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BPKAD Kota Samarinda. Pokok-pokok yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;



3. Realisasi program/ kegiatan yang melampaui target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BPKAD Kota Samarinda; dan
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Samarinda

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPKAD Kota Samarinda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tupoksi masing - masing BPKAD Kota Samarinda dan peraturan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Samarinda Berisikan tentang:

1. Sejauh mana tingkat pelayanan BPKAD Kota Samarinda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BPKAD Kota Samarinda;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKAD Kota Samarinda;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BPKAD Kota Samarinda;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Reviu terhadap Renja BPKAD Kota Samarinda Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisa kebutuhan;



2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan rancangan RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi. Sub bab ini mendiskripsikan:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kota Samarinda

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Kota Samarinda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BPKAD Kota Samarinda.

3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian mengenai garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; dan
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program dan kegiatan, pagu indikatif, maupun keduanya.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung administrasi, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan rumusan program dan kegiatan yang tidak terdapat/ sesuai dalam RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana Tindak Lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda di tahun 2024 sampai dengan Triwulan II secara umum masih selaras dengan dinamika yang ada setelah melalui penyelarasan dan penyempurnaan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan penilaian atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Triwulan II menunjukkan kinerja yang optimal, selaras dan masih on the track dengan target serta capaian yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari berjalannya semua kegiatan, selaras dengan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Monitoring dan evaluasi secara berkala terfokus pada beberapa program/kegiatan prioritas yang terindikasi capaian realisasinya masih rendah. Hal ini berpengaruh pada tahap perencanaan anggaran terkait dinamika penganggaran dengan kebutuhan insidentil/tidak terduga yang sulit diprediksi sebelumnya dan terkait penunjang pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi penunjang pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi kinerja setiap kegiatan serta kebutuhan rutin pada tahun-tahun sebelumnya, akomodasi terhadap usulan rencana kebutuhan barang yang masuk serta proyeksi cadangan bagi kebutuhan insidentil/tidak terduga merupakan unsur terpenting dalam proses penganggaran dengan berpedoman pada setiap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda untuk beberapa program/kegiatan lebih mengedepankan outcome atas capaian target kinerja yang telah ditentukan. Proyeksi terhadap alokasi penyediaan juga tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan yang ada seiring dinamika yang terus berkembang mengikuti mekanisme serta kebijakan yang ada. Sinkronisasi dalam setiap langkah perencanaan menjadi pola rutin



karena Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penunjang mempunyai tugas penting dalam memenuhi dan melayani masyarakat umum guna menunjang capaian program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Sebagai catatan khusus bagi pelaksanaan program/kegiatan yang mempunyai capaian realisasi anggaran rendah disamping realisasi fisiknya juga tidak mencapai hasil maksimal, hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor yang diantaranya meliputi pertimbangan hasil kajian, kebijakan maupun mekanisme yang tidak memungkinkan untuk direalisasikan sepenuhnya berdasarkan prioritas dan peraturan perundangan yang ada.

Dalam pelaksanaan serta evaluasi yang berjalan, beberapa program / kegiatan perlu adanya perubahan pada rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda guna mengakomodasi serta menyelaraskan terhadap berbagai dinamika kebutuhan prioritas yang berkembang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dengan penyesuaian atas APBD Tahun 2024.

Perubahan rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2024, dinamika kebutuhan yang sedang berkembang serta faktor efisiensi pada beberapa belanja kegiatan yang memungkinkan optimalisasi capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada.

Pada tahun 2024 belanja operasi diarahkan guna mendanai program dan kegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan tujuan dan target sasaran yang jelas guna mendukung arah kebijakan pemerintah daerah Kota Samarinda Tahun 2024. Sedangkan untuk belanja pegawai, pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja pegawai yang rutin diperuntukkan sebagai pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.



Adapun alokasi serta realisasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sampai Triwulan II (Semester I) tahun 2024 pada Badan Pengelolan keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Tingkat rata - rata capaian kinerja dan realisasi anggaran pada evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II masih menunjukkan Tingkat Capaian Kinerja 65,51% dan Realisasi Anggaran Renja OPD 46,99%. Namun evaluasi kinerja ini dikalkulasi dengan indikator kinerja output melalui besaran serta capaian output yang telah terealisasi terhadap target yang telah ditentukan. Evaluasi capaian kinerja outcome akan berpengaruh lebih signifikan untuk menunjukkan predikat kinerja lebih baik yang telah dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sebagai unit penunjang di bidang Pengelolaan Keuangan . Realisasi dari target output yang ditetapkan tidak selalu berbanding lurus dengan proyeksi perencanaan di awal, hal ini dikarenakan sebagian besar dari kegiatan yang ada pada rencana kerja merupakan kegiatan rutin penyediaan yang tidak terduga atau situasional/insidentil mengacu pada dinamika kebutuhan tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota samarinda optimis on the track atas semua pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda pada tahun berjalan ini dilakukan demi mencapai optimalisasi dan keselarasan. Efisiensi serta rasionalisasi pada beberapa belanja kegiatan yang memungkinkan terwujudnya optimalisasi capaian kinerja pada program kegiatan lebih diprioritaskan berpedoman pada peraturan dan kebijakan yang ada. Hal ini dapat dimonitor dari hasil evaluasi berkala atas semua program kegiatan yang ada terhadap target capaian yang diharapkan.

Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel T-C 29 berikut :

Tabel T-C. 29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2025
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : BPKAD Kota Samarinda

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN 2024	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)2024	Satuan Indikator 2024	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Laporan Keuangan Daerah	Laporan	1		1	1	100	1	0	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen	2		2	2	100	2	0	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.01	1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS sesuai Regulasi dan Kebijakan Penganggaran	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS sesuai Regulasi dan Kebijakan Penganggaran yang di susun	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.01	3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD sesuai Regulasi dan Kebijakan Penganggaran yang di Verifikasi	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.01	4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD sesuai Regulasi dan Kebijakan Penganggaran yang di Verifikasi	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.01	5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD sesuai Regulasi dan Kebijakan Penganggaran	Dokumen	1	100	1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.01	6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang di Verifikasi	Laporan	1		1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.01	7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	0	2	2	100	2	2	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.01	8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	2	2	100	2	2	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.01	9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.01	13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	1		150	150	100	47	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	Buku	5			6	100	5	5	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.02	1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.02	2 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	1		1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.02	3 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	1	4	47	47	100	47	47	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.02	4 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100

5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	1	4	1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	1		1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	1		1	1	100	1	2	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	200		200	200	100	1	200	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	Buku	3		3	3	100	3	0	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	36	4	36	36	100	36	36	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	12	4	12	12	100	34	12	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	18		18	18	100	18	18	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	9		9	9	100	9	9	100

5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	2	9	0	0	100	12	0	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	3		3	3	100	3	3	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	150	1	150	150	100	1	150	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	13		13	13	100	5	13	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	2		2	2	100	0	0	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	0	100	2	2	100	0	2	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rekonsiliasi Laporan Penerimaan OPD	Laporan	3		3	3	100	3	0	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	150		150	150	100	12	150	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	Laporan	1		1	1	100	1	0	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	Dokumen	1		1	1	100	1	0	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1		1	1	100	200	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1		1	1	100	47	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1		1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	10	1	1	100	20	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1		1	1	100	3	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1		1	1	100	80	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	100	1	1	100	3	1	100

5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	1	1	100	48	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1		1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	150	0	150	150	100	4	150	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	79		75	85.69		75		114.25
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	70		51	73		73		69.86
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5		5	5	100	5	5	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7	1	1	100	1	1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4		0	0	100	1	0	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	12		7	7	100	7	0	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	81	100	81	81	100	81	81	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang dokumen	52	52	1	1	100	52	157	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	7		7	7	100	7	7	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	4		7	7	100	7	0	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2	12	12	100	12	12	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2	30	30	100	12	30	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	5	5	100	30	20	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen Paket	4	4	4	4	100	4	4	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Surat Kabar Dokumen	4800		100	100	100	4800	100	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rombongan Laporan	10		10	10	100	10	10	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SPPD Laporan	50	100	50	50	100	50	50	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Laporan	1		1	1	100	1	0	100

5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan			2					1			
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	75		75	75	100		75	75		100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	4		1	1	100		1	0		100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bukti Pembayaran Laporan	36	48	36	36	100		36	36		100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bukti Pembayaran Laporan	5	100	5	5	100		5	5		100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Laporan	12		144	144	100		144	0		100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	66		66	66	100		66	66		100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	66	100	66	66	100		66	66		100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2		2	2	100		2	2		100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung Unit	1	100	1	1	100		1	1		100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100	1	1	100		1	1		100



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPKAD KOTA SAMARINDA

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana BPKAD Kota Samarinda sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan meliputi aspek: (a) perencanaan keuangan dan (b) manajemen keuangan. Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja BPKAD Kota Samarinda dengan realisasinya. Pada tahun 2024 BPKAD Kota Samarinda menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukurannya, Capaian Kinerja BPKAD Kota Samarinda sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	<i>Opini Laporan Keuangan</i>	WTP	WTP	100%

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2023.

Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja

<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Laporan Keuangan Daerah;</i>
<i>Target</i>	1 Laporan
<i>Realisasi</i>	1 Laporan
<i>Capaian</i>	100%

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2023.



Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka salah satu sasaran strategis BPKAD Kota Samarinda yang mendukung hal tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, maka Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), menjadi instrumen pengukuran kinerja. Dimana kualitas pengukuran keuangan daerah diukur dengan IPKD yang terdiri dari:

1. Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (dengan bobot 15);
2. Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (dengan bobot 20);
3. Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (dengan bobot 15);
4. Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD (dengan bobot 20);
5. Dimensi Kondisi Keuangan Daerah (dengan bobot 15); dan
6. Dimensi Opini BPK atas LKPD (dengan bobot 20).

Total bobot masing-masing dimensi dikompilasikan membangun Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah merupakan sasaran strategis yang juga mendukung meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah (Tujuan BPKAD Kota Samarinda). Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMD, dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada tahun 2022, target 100%, realisasi mencapai 100%, dengan capaian 100%. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pencatatan aset daerah pada masing-masing perangkat daerah.

Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dilihat pada Tabel T-C 30

Proyeksi		Catatan Analisis
Tahun 2025	Tahun 2026	
11	12	13
1 Laporan	1 Laporan	
Dokumen (murni dan Perubahan)	2 Dokumen (murni dan Perubahan)	
1 Dokumen	1 Dokumen	
1 Dokumen	1 Dokumen	
1 Dokumen	1 Dokumen	



[illegible]

30	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			12 Sidang dan 4 Laporan	12 Sidang dan 4 Laporan	12 Sidang dan 4 Laporan	12 Sidang dan 4 Laporan	12 Sidang dan 4 Laporan	12 Sidang dan 4 Laporan	12 Sidang dan 4 Laporan	12 Sidang dan 4 Laporan	
31	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
32	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			3 Regulasi	3 Regulasi	3 Regulasi	3 Regulasi	3 Regulasi	3 Regulasi	3 Regulasi	3 Regulasi	
33	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
34	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina			8 BLUD	10 BLUD	12 BLUD	14 BLUD	8 BLUD	10 BLUD	12 BLUD	14 BLUD	
35	Rekonsiliasi Laporan Penerimaan OPD			3 Jenis Laporan	3 Jenis Laporan	3 Jenis Laporan	3 Jenis Laporan	3 Jenis Laporan	3 Jenis Laporan	3 Jenis Laporan	3 Jenis Laporan	
36	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
37	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
38	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
39	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
40	Jumlah Standar Harga yang Disusun			1 Buku SIPD	1 Buku SIPD	1 Buku SIPD	1 Buku SIPD	1 Buku SIPD	1 Buku SIPD	1 Buku SIPD	1 Buku SIPD	
41	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			200 buku dan 200 CD	200 buku dan 200 CD	200 buku dan 200 CD	200 buku dan 200 CD	200 buku dan 200 CD	200 buku dan 200 CD	200 buku dan 200 CD	200 buku dan 200 CD	
42	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			47 OPD	47 OPD	47 OPD	47 OPD	47 OPD	47 OPD	47 OPD	47 OPD	
43	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	
44	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
45	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
46	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			20 Sertifikat Tanah & 50 Patok Tanah	25 Sertifikat Tanah & 60 Patok Tanah	25 Sertifikat Tanah & 70 Patok Tanah	30 Sertifikat Tanah & 80 Patok Tanah	20 Sertifikat Tanah & 50 Patok Tanah	25 Sertifikat Tanah & 60 Patok Tanah	25 Sertifikat Tanah & 70 Patok Tanah	30 Sertifikat Tanah & 80 Patok Tanah	
47	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			3 daftar	3 daftar	3 daftar	3 daftar	3 daftar	3 daftar	3 daftar	3 daftar	
48	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			80 BMD	100 BMD	120 BMD	135 BMD	80 BMD	100 BMD	120 BMD	135 BMD	

[illegible]

[illegible]

86	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			30 surat	30 surat	30 surat	30 surat	30 surat	30 surat	30 surat	30 surat	
87	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	
88	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			30 Bukti Pembayaran	30 Bukti Pembayaran	30 Bukti Pembayaran	30 Bukti Pembayaran	30 Bukti Pembayaran	30 Bukti Pembayaran	30 Bukti Pembayaran	30 Bukti Pembayaran	
89	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			5 Bukti Pembayaran	5 Bukti Pembayaran	5 Bukti Pembayaran	5 Bukti Pembayaran	5 Bukti Pembayaran	5 Bukti Pembayaran	5 Bukti Pembayaran	5 Bukti Pembayaran	
90	Laporan Pemeliharaan			144 Unit	154 Unit	159 Unit	164 Unit	144 Unit	154 Unit	159 Unit	164 Unit	
91	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			66 Unit	66 Unit	66 Unit	66 Unit	66 Unit	66 Unit	66 Unit	66 Unit	
92	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			66 Unit	66 Unit	66 Unit	66 Unit	66 Unit	66 Unit	66 Unit	66 Unit	
93	Jumlah Mebel yang Dipelihara			30 Unit	40 Unit	45 Unit	50 Unit	30 Unit	40 Unit	45 Unit	50 Unit	
94	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
95	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
96	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	
97	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	
98	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	
99	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			124,950,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	124,950,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	



2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPKAD KOTA SAMARINDA

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BPKAD Kota Samarinda tetap mempertimbangkan isu-isu strategis sebagai bentuk responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan). Secara garis besar keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh sinergitas antar fungsi BPKAD Kota Samarinda dan antar lembaga perbankan, dan lembaga non perbankan.

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- a. Pelaksanaan Aplikasi SIPD Penatausahaan, Pelaporan dan Pencatatan Aset
- b. Mekanisme Pergeseran Anggaran
- c. Sertifikasi Aset Pemerintah Kota
- d. Peran Kustodian di Perangkat Daerah dalam Penatausahaan BMD
- e. Pemanfaatan Aset

Rekomendasi dan Catatan Stragetis

- a. Percepatan Implementasi SIPD Penatausahaan dan Pelaporan serta Integrasi Pencatatan Aset.
- b. Penyusunan Perkada berkaitan dengan Pergeseran Anggaran
- c. Penelusuran dan Percepatan Sertifikasi Aset Milik Pemerintah Kota Samarinda
- d. Optimalisasi Pengurus Barang/ Kustodian di Perangkat Daerah
- e. Koordinasi dengan SKPD Terkait Tarif dari Pemanfaatan Aset

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain semakin menurunnya kapasitas fiskal nasional yang berdampak pada ruang fiskal daerah. Di sisi lain kondisi ruang fiskal daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan dari kapasitas ruang fiskal yang ada, terdapat pertambahan alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan CPNS dan P3K yang bertambah 3.478 ASN pada tahun 2022.

Dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas, maka diperlukan inovasi dalam perencanaan anggaran guna mendukung visi-misi kepala daerah, program-program nasional/ internasional (NSPK, SPM, an SDG's). BPKAD Kota Samarinda sebagai Unsur Penunjang di Bidang Keuangan, memegang peran penting dalam menyusun “rancang bangun” anggaran khususnya pada tahun 2024. Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi Keys of Development Goals bagi BPKAD Kota Samarinda dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub



kegiatan. Secara konkret, Keys of Development Goals di lingkup BPKAD Kota Samarinda dilaksanakan melalui:

1. Rapat koordinasi Lintas BPKAD Kota Samarinda dalam rangka melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan APBD sesuai dengan agenda prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025.
2. Desk Rembug Kinerja dalam rangka untuk menyusun Indikator Kinerja Individu, Perjanjian Kinerja, dan Penilaian Kinerja, sesuai dengan Renstra BPKAD Kota Samarinda tahun 2021-2026, dan Rankir RKPD Tahun 2025.
3. Evaluasi Internal dalam rangka membangun Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup BPKAD Kota Samarinda, dan dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yaitu Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis BPKAD Kota Samarinda, terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen BPKAD Kota Samarinda, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- (1) BPKAD Kota Samarinda memiliki peran strategis yang memiliki fungsi koordinatif dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- (2) BPKAD Kota Samarinda telah memiliki sistem dan prosedur perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kelembagaan,



terutama pada aspek kinerja dan pengelolaan keuangan;

- (3) Pemanfaatan SPBE yang mendukung kinerja dan pelayanan BPKAD Kota Samarinda sebagai pusat data dan informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pemanfaatan sistem informasi (aplikasi) keuangan/ aset daerah;
- (4) BPKAD Kota Samarinda memiliki Sumber Daya Aparatur yang memiliki semangat kerja, teamwork yang solid, dengan tingkat spesifikasi dan kualifikasi pegawai yang mengisi formasi jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana, yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
- (5) BPKAD Kota Samarinda memiliki kegiatan diklat, seminar, bimtek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan/ lembaga swasta, perguruan tinggi/ akademisi, dan konsultan/ praktisi
- (6) Komitmen pimpinan BPKAD Kota Samarinda dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel sebagai unsur pendukung dalam pencapaian keberhasilan program-program prioritas pembangunan daerah;
- (7) Penguatan Struktur dan Tata Kerja Organisasi (STOK) pada Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda, telah membawa perubahan pada ruang lingkup perencanaan penganggaran;
- (8) Penyederhanaan Birokrasi, dimana terdapat jabatan fungsional baru: Perencana, Analis Kebijakan, dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagai bentuk dukungan dan penguatan kinerja organisasi;

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- (1) Implementasi Jabatan Fungsional belum optimal;
- (2) Kompetensi pegawai (etos kerja, budaya kerja, pengetahuan) yang belum merata dan perlu di-upgrading;
- (3) Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (Staf/ Pelaksana/JFU);
- (4) Lemahnya rentang kendali pelaporan dan penyajian data yang kurang tepat waktu;



- (5) Pengelolaan data dan arsip yang belum tertata sesuai ketentuan;
- (6) Lemahnya aspek pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan capaian kinerja (output, outcome, benefit, impact) dan belum optimalnya evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada pada lingkungan organisasi. Hal tersebut tidak dapat dikelola secara langsung oleh Manajemen BPKAD Kota Samarinda. Namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Kebijakan (politicalwill) Kepala Daerah dalam pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas, yang diwujudkan dengan meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Panca Bhakti;
- 2) Perubahan paradigma penganggaran yang lebih menitikberatkan pada kemampuan fiskal daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah;
- 3) Koordinasi dan komunikasi antara BPKAD Kota Samarinda dengan DPRD, Perangkat Daerah dan Lembaga Keuangan, Lembaga Non Keuangan, maupun Pemprov/ pusat yang telah berjalan efektif dalam merespons setiap perubahan kebijakan dan penyelesaian masalah dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) BPKAD Kota Samarinda memiliki kerja sama dengan mitra kerja (DPRD/ Perguruan Tinggi/ Akademisi, Lembaga Keuangan Perbankan) yang sangat efektif dalam peningkatan kinerja dan penatausahaan keuangan dan aset daerah;
- 5) Pendampingan yang efektif lembaga konsultan dalam mendukung kinerja dan penyelesaian masalah keuangan dan aset daerah;
- 6) Potensi Aset Daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya guna mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma dokumen perencanaan periode tahun 2021-2026, yang lebih menitikberatkan pada kesejahteraan sosial



masyarakat, peningkatan taraf hidup masyarakat, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, yang berimplikasi pada kekuatan dan kemampuan fiskal daerah dalam mengakomodasi agenda pembangunan daerah;

- (2) Berkurangnya Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dikarenakan kapasitas fiskal nasional menurun;
- (3) Belum optimalnya capaian Pendapatan Daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (4) Alokasi belanja pegawai daerah yang relatif besar; dan
- (5) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, sehingga permasalahan aset belum terselesaikan

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2025, maka program, kegiatan, dan sub kegiatan diarahkan pada dukungan capaian kinerja utama Pemerintah Kota Samarinda, secara terpadu, berkelanjutan, berkeadilan antar wilayah di Kota Samarinda.

Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana secara teknis dilaksanakan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah pada akhirnya diukur dengan instrumen Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

BPKAD Kota Samarinda sebagai pendukung urusan keuangan, secara umum mendukung seluruh tema-tema tersebut melalui fasilitasi perencanaan anggaran dan implementasi penganggaran berbasis tematik pembangunan 2023. Dalam arti bahwa BPKAD Kota Samarinda mengawal konsistensi perencanaan anggaran, dengan maksud agar seluruh tema tersebut telah masuk dalam proses penganggaran secara tepat dan mengawal proses pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara tepat waktu.

Secara khusus, BPKAD Kota Samarinda juga mendukung optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis e-governemnt, mengingat dalam menjalankan



mekanisme perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah, sampai dengan pelaporan akuntansi, BPKAD Kota Samarinda menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan FMIS, yang terus diupgrade setiap periodik. Hal tersebut untuk menjamin penyajian data keuangan dan aset secara tepat waktu dan up to date.

Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C 31.

Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Keuangan Daerah	1 Laporan	8,020,674,251	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Keuangan Daerah	1 Laporan	8,020,674,251		
2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen (murni dan Perubahan)	2,806,839,680	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen (murni dan Perubahan)	2,806,839,680	Bidang Anggaran	
3	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	218,545,400	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	218,545,400	Bidang Anggaran	
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	218,545,400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	218,545,400	Bidang Anggaran	
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	273,181,750	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	273,181,750	Bidang Anggaran	
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Perubahan RKAP-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	273,181,750	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Perubahan RKAP-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	273,181,750	Bidang Anggaran	
7	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	344,209,005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	344,209,005	Bidang Anggaran	
8	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Perubahan DPAP-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	273,181,750	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Perubahan DPAP-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	273,181,750	Bidang Anggaran	
9	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Perda dan Perwali	504,988,400	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Perda dan Perwali	504,988,400		
10	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Perda dan Perwali	467,687,156	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Perda dan Perwali	467,687,156		
11	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Regulasi	178,682,719	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Regulasi	178,682,719	Bidang Anggaran	
12	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	47 SKPD	54,636,350	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	47 SKPD	54,636,350		
13	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku	2,375,612,538	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku	2,375,612,538		
14	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	1 Laporan	163,909,050	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Laporan	163,909,050		
15	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	109,272,700	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	109,272,700		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggujawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	47 OPD	382.017.359	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	47 OPD	382.017.359		
17	Penatausahaan Pembayaan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan Daerah	1 Laporan	54.636.350	Penatausahaan Pembayaan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan Daerah	1 Laporan	54.636.350		
18	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Laporan	184.585.630	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Laporan	184.585.630		
19	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Laporan	420.699.895	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Laporan	420.699.895		
20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	54.636.350	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	54.636.350		
21	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Laporan	54.636.350	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Laporan	54.636.350		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Laporan	442.554.435	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Laporan	442.554.435		
23	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Samarinda	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	454.028.069	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Samarinda	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	454.028.069		
24	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Perwali	54.636.350	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Perwali	54.636.350		
25	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Samarinda	Buku Laporan Keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	3 Jenis Buku Laporan Keuangan	2.838.222.033	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Samarinda	Buku Laporan Keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	3 Jenis Buku Laporan Keuangan	2.838.222.033		
26	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan	325.086.283	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan	325.086.283		
27	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	34 Laporan	163.909.050	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	34 Laporan	163.909.050		
28	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	109.272.700	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	109.272.700		
29	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	9 Laporan	437.090.800	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	9 Laporan	437.090.800		
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12 Sidang dan 4 Laporan	54.500.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12 Sidang dan 4 Laporan	54.500.000		
31	Penyusunan Analis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Buku	109.272.700	Penyusunan Analis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Buku	109.272.700		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Regulasi	114.736.335	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Regulasi	114.736.335		
33	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	546.363.500	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	546.363.500		
34	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	12 BLUD	218.545.400	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	12 BLUD	218.545.400		
35	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Samarinda	Rekonsiliasi Laporan Penerimaan OPI	3 Jenis Laporan	759.445.265	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Samarinda	Rekonsiliasi Laporan Pen	3 Jenis Laporan	759.445.265		
36	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Laporan	379.722.633	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Laporan	379.722.633		
37	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Laporan	379.722.633	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Laporan	379.722.633		
38	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2.924.357.030	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2.924.357.030		
39	Pengelolaan Barang Milik daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2.924.357.030	Pengelolaan Barang Milik daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2.924.357.030		
40	Penyusunan Standar Harga	Kota Samarinda	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Buku SIPD	109.272.700	Penyusunan Standar Harga	Kota Samarinda	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Buku SIPD	109.272.700		
41	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	200 buku dan 200 CD	54.636.350	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	200 buku dan 200 CD	54.636.350		
42	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	47 OPD	163.909.050	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	47 OPD	163.909.050		
43	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Regulasi	54.636.350	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Regulasi	54.636.350		
44	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	655.636.200	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	655.636.200		
45	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	54.636.350	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	54.636.350		
46	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 Sertifikat Tanah & 70 Patok Tanah	546.363.500	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 Sertifikat Tanah & 70 Patok Tanah	546.363.500		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 daftar	327.818.100	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 daftar	327.818.100		
48	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	120 BMD	163.909.050	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	120 BMD	163.909.050		
49	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Laporan & 2000 BMD	327.818.100	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Laporan & 2000 BMD	327.818.100		
50	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	48 OPD	245.067.900	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	48 OPD	245.067.900		
51	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Dokumen	54.636.350	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Dokumen	54.636.350		
52	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	166.017.030	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	166.017.030		
53	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Samarinda	Nilai IKM	81	71.196.343.714	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Samarinda	Nilai IKM	81	71.196.343.714		
54	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	80	150.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	80	150.000.000		
55	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	50.000.000		
56	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000		
57	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000		
58	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000		
59	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	50.000.000		
61	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000		
62	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	7 Laporan	60.537.075.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	7 Laporan	60.537.075.800		
63	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang	58.460.894.500	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang	58.460.894.500		
64	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Orang	2.021.544.950	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Orang	2.021.544.950		
65	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	54.636.350	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	54.636.350		
66	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai	131 Orang	55.591.160	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai	131 Orang	55.591.160		
67	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	131 Paket	55.591.160	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	131 Paket	55.591.160		
68	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			
69	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			
70	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang			
71	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah laporan	7 Laporan	2.185.978.509	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah laporan	7 Laporan	2.185.978.509		
72	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	764.908.900	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	764.908.900		
73	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	245.863.575	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	245.863.575		
74	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 jenis	163.909.050	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 jenis	163.909.050		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis	218.545.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis	218.545.400		
76	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Dokumen	163.909.050	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Dokumen	163.909.050		
77	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.800 Surat Kabar	66.088.129	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.800 Surat Kabar	66.088.129		
78	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Rombongan	218.545.400	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Rombongan	218.545.400		
79	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 SPPD	344.209.005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 SPPD	344.209.005		
80	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan	1.236.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan	1.236.000.000		
81	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	618.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	618.000.000		
82	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	309.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	309.000.000		
83	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	309.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	309.000.000		
84	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				
85	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	4.179.680.775	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	4.179.680.775		
86	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 surat	5.463.635	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 surat	5.463.635		
87	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Bukti Pembayaran	786.763.440	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Bukti Pembayaran	786.763.440		
88	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Bukti Pembayaran	163.909.050	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Bukti Pembayaran	163.909.050		
89	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Bukti Pembayaran	3.223.544.650	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Bukti Pembayaran	3.223.544.650		
90	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan	159 Unit	2.852.017.470	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan	159 Unit	2.852.017.470		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66 Unit	655.636.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66 Unit	655.636.200		
92	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	546.363.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	546.363.500		
93	Pemeliharaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit	32.781.810	Pemeliharaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit	32.781.810		
94	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	60.099.985	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	60.099.985		
95	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	273.181.750	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	273.181.750		
96	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	382.454.450	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	382.454.450		
97	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Perasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Jenis	655.636.200	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Perasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Jenis	655.636.200		
98	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Jenis	245.863.575	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Jenis	245.863.575		
99	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Samarinda			-	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Samarinda			-		
100	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50.000.000.000	-	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50.000.000.000	-		



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan isu-isu strategis terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, telah dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang diusulkan melalui mekanisme perencanaan dalam Musrenbang mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, sampai dengan Kota Samarinda. Berdasarkan hasil proses musrenbang tersebut, maka pada tahun anggaran 2023 di BPKAD Kota Samarinda tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari usulan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena usulan program tersebut bersifat teknis dan langsung kepada masyarakat, sehingga pada tahun 2023 penyalurannya hanya terdapat pada PD teknis, dan tidak terdapat pada PD pendukung seperti BPKAD Kota Samarinda.

Hasil Usulan Program / Kegiatan BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C 32.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : BPKAD Kota Samarinda

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda di bidang keuangan, selain mengacu pada isu/ agenda pembangunan global dan regional, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berpedoman pada Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.

Prioritas pembangunan nasional adalah terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas/ Nawacita yang diimplementasikan dalam strategi pembangunan nasional dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat dan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth), Kesenjangan Antar Generasi (intergenerational equity) dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Di Kota Samarinda, pemerintah daerah berupaya menjawab isu-isu global, regional, nasional, dan daerah melalui perumusan strategi pembangunan yang dijabarkan dalam visi misinya, yang secara garis besar berupaya menyejahterakan, memajukan (masyarakat) Kabupaten Blitar agar memiliki daya saing. Kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya merupakan syarat mendasar dalam mewujudkan daya saing sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kota Samarinda, maka BPKAD Kota Samarinda merespon isu-isu dan kebijakan nasional, regional, dan daerah dengan semakin meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Tahun 2025. Dengan memperhatikan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kota Samarinda Tahun 2025, yaitu Pembangunan



SDM dan Penguatan Berbasis Kawasan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai table berikut:

Misi 3	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas
Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Opini Laporan Keuangan	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan matriks RKPD Kota Samarinda Tahun 2024, maka BPKAD Kota Samarinda melaksanakan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, melalui kebijakan penguatan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan dengan strategi:
 1. Secara internal, melaksanakan: Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja; Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur; Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Keuangan; Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah untuk mendukung peningkatan PAD; Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peningkatan kualitas Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah untuk meningkatkan PAD, terkait dengan penyesuaian harga sewa pemanfaatan aset daerah (sesuai dengan penilaian aset pada tahun 2023), perencanaan, kebijakan serta perencanaan standar kebutuhan aset per perangkat daerah, serta tingkat kesesuaian antara nilai aset pada Neraca Keuangan dan Neraca BMD, pelaporan dan pembinaan SDM Pengelola Aset; dan
 4. Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu.



3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Renja BPKAD Kota Samarinda tahun 2025 mengacu pada Renstra BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026, yang selanjutnya mengacu pada RKPD Kota Samarinda tahun 2023.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran misi ke-3). BPKAD Kota Samarinda sebagai unsur pendukung di bidang Keuangan menerjemahkan sasaran strategis Kota Samarinda ke dalam Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tujuan BPKAD Kota Samarinda :

Meningkatnya kualitas penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, standar satuan harga, analisa standar belanja, dan Meningkatkan Pelayanan yang Akuntabel.

Sasaran BPKAD Kota Samarinda :

Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Indikator Sasaran: Opini Laporan Keuangan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran misi ke-3). BPKAD Kota Samarinda sebagai unsur penunjang di bidang Keuangan menerjemahkan sasaran strategis Kota Samarinda ke dalam Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan target dan penjabaran sebagai berikut:

Sasaran/ Indikator Sasaran/ (Definisi Operasional)	Target						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2							
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja							
Opini Laporan Keuangan	n/a	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Formulasi= Opini BPK terhdap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda							



Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan BPKAD Kota Samarinda pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pada prinsipnya rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan pada Renstra BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah bersifat indikatif. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda, maka tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dengan indikator yang terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional, dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan. Selanjutnya strategi dan kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan indikator yang lebih spesifik. Perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Ruang lingkup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut merupakan sebuah proses bisnis (business process) untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada BPKAD Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota merupakan program rutin yang diampu oleh Sekretariat BPKAD Kota Samarinda, sebagai unsur perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota secara langsung mendukung Sasaran Perangkat Daerah. Secara spesifik, program penunjang mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Selanjutnya program penunjang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar



Realisasi Kinerja SKPD.

- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu; dan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Mebel
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; dan
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya; dan
 - d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau



Bangunan Lainnya.

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, serta Bidang Akuntansi. Program tersebut mendukung Sasaran Perangkat Daerah yaitu: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Sasaran: (1) Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; (2) Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD; (3) Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran Dalam APBD; (5) Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah; dan (6) Opini BPK. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.



Selanjutnya Program Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
 - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
 - j. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota.
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (diampu oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah), dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
 - c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
 - d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
 - e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan



Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

- h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;
 - i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
 - j. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan; dan
 - k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan sub kegiatan:
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
 - c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
 - d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - f. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - g. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - h. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
 - i. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota.
4. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan sub kegiatan:
- a. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah



- b. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- 5. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Aset Daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mendukung Sasaran Perangkat Daerah: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah, dengan Indikator Sasaran: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah.

Program tersebut secara spesifik mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Selanjutnya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dijabarkan dalam Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
4. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
5. Pengamanan Barang Milik Daerah;
6. Penilaian Barang Milik Daerah;
7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
8. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; dan
9. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.



3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat Tabel T-C 33

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : BPKAD Kota Samarinda

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Lembar 1 Dari SIPD	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	81 Nilai	46.195.118.626,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		81 Nilai	72.568.275.295,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	80	325.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85 Nilai	110.000.000,00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	5 Dokumen	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	50.000.000,00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Laporan	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	50.000.000,00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	4 Laporan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	10.000.000,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	7 Laporan	38.394.491.326,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Laporan	62.353.188.075,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	81 Orang/Bulan	35.287.995.755,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		81 Orang/Bulan	60.214.721.335,00
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	52 Dokumen	3.056.495.571,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		52 Dokumen	2.082.191.269,00
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	7 Laporan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Laporan	58.275.441,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	131 Orang	255.591.180,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		131 Orang	257.258.896,00
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	131 Paket	55.591.180,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		131 Paket	57.268.896,00
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	40 Orang	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Orang	200.000.000,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	7 Laporan	1.685.978.509,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Laporan	2.251.557.865,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	12 Paket	364.908.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	787.856.187,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	12 Paket	245.863.575,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	253.239.482,00
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	30 Paket	163.909.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Paket	168.826.322,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	5 Paket	118.545.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	225.101.782,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	4 Paket	163.909.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	168.826.322,00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	4800 Dokumen	66.088.129,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4800 Dokumen	68.070.773,00
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	10 Laporan	218.545.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Laporan	225.101.782,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	50 Laporan	344.209.005,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Laporan	354.535.275,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	3 Laporan	727.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	318.270.000,00
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Unit	318.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	0,00
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	2 Unit	309.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	0,00
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	75 Unit	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Unit	318.270.000,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Laporan	2.155.040.161,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	4.305.071.199,00
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	30 Laporan	5.463.635,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Laporan	5.627.544,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	36 Laporan	786.783.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Laporan	810.366.343,00
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	30 Laporan	139.288.436,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Laporan	168.826.322,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	5 Laporan	1.223.544.650,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	3.320.250.990,00

5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	159 Unit	2.852.017.470,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	164 Laporan	2.902.939.261,00
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	66 Unit	855.836.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	66 Unit	875.308.298,00
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	66 Unit	548.383.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	66 Unit	573.881.675,00
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	45 Unit	32.781.810,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Unit	34.420.901,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	2 Unit	60.099.985,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	63.104.984,00
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Unit	273.181.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	273.181.750,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Unit	382.454.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	401.577.173,00
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Unit	455.836.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	688.418.010,00
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Unit	245.883.575,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	253.239.482,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Laporan Keuangan Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Laporan	56.466.174.252,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	8.205.159.483,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	2 Dokumen (Murni dan Perubahan)	2.406.830.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	2.891.044.873,00
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	268.545.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	225.101.782,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	268.545.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	225.101.782,00
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	223.181.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	281.377.203,00
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	223.181.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	281.377.203,00
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	294.209.005,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	354.535.275,00
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	223.181.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	281.377.203,00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	254.988.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	520.138.052,00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	317.687.158,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	481.717.771,00
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	228.682.719,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	184.043.201,00
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	100 Orang	104.638.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47 Orang	56.275.441,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	5 Jenis Buku	1.675.812.538,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Jenis Buku	2.448.880.917,00
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	183.909.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	188.826.322,00
5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Laporan	109.272.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	112.550.881,00
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	282.017.358,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47 Dokumen	393.477.880,00
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	54.636.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	56.275.441,00
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	184.585.630,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	190.123.199,00
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	220.899.895,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	433.320.892,00
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Laporan	54.636.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	56.275.441,00
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	54.636.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	56.275.441,00
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	242.554.435,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	455.831.088,00

5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	254.028.089,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	407.848.911,00
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	150 Orang	54.636.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Orang	56.275.441,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Buku Laporan Keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	3 Jenis buku Lap. Keuangan	1.624.278.768,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Jenis buku Lap. Keuangan	2.085.005.071,00
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	36 Laporan	325.086.283,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36 Laporan	334.838.571,00
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	183.909.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	34 Dokumen	168.828.322,00
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	18 Laporan	109.272.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18 Laporan	112.560.881,00
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	9 Laporan	337.090.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Laporan	450.203.524,00
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	109.272.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	112.560.881,00
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	114.736.335,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	118.178.425,00
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	150 Orang	248.363.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Orang	582.754.405,00
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	12 Lembaga	218.545.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14 Lembaga	225.101.762,00
5.02.02.2.04	Perunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Belanja Keadaan darurat termasuk keperluan Mendesak yang dipenuhi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Paket	50.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	0,00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Laporan	50.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	0,00
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rekonsiliasi Laporan Penerimaan OPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	3 Jenis Laporan	759.445.286,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Jenis Laporan	782.228.822,00
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	379.722.833,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	391.114.311,00
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	150 Orang	379.722.833,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Orang	391.114.311,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	77.357.738.171,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	3.012.033.744,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	77.357.738.171,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	3.012.033.744,00
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	109.272.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	112.505.881,00
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	54.636.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200 Dokumen	56.272.441,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	103.909.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47 Dokumen	168.828.322,00
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	54.636.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	56.275.441,00
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Laporan	40.735.697.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	675.305.286,00
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Laporan	54.636.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	56.272.441,00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Laporan	35.099.483.841,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Laporan	582.754.405,00
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Laporan	127.818.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	337.652.643,00
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Laporan	183.909.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	135 Laporan	168.828.322,00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Dokumen	327.818.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	337.652.643,00
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Laporan	245.067.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48 Laporan	282.419.937,00
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1 Laporan	54.636.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	56.272.441,00
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	150 Orang	168.017.030,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Orang	170.997.541,00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 tetap mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah dan dinamika yang berkembang terkait situasi Penanganan Inflasi Daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2024. Dinamika yang sedang berkembang memerlukan langkah rasionalisasi pada beberapa belanja kegiatan yang diharapkan mampu mengoptimalkan capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada. Sedangkan untuk belanja tidak langsung juga diakomodir dalam rencana kerja tahun 2025, pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja pegawai yang rutin diperuntukkan sebagai pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Pada Tahun 2025, anggaran tersebut dikelola melalui mekanisme Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD), sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA						265.901.874.444,00							83.815.468.522,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						265.901.874.444,00							83.815.468.522,00	
	5.02	KEUANGAN						265.901.874.444,00							83.815.468.522,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	81 Nilai			81 Nilai	46.195.118.626,00						81 Nilai	72.598.275.295,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	90 Nilai			80	325.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	85 Nilai	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	8 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			4 Laporan	50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan			7 Laporan	38.394.491.326,00			-	-	Perangkat Daerah	7 Laporan	62.353.188.075,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan			81 Orang/bulan	35.287.995.755,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	81 Orang/bulan	60.214.721.335,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Dokumen			52 Dokumen	3.056.495.571,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	52 Dokumen	2.082.191.299,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan			7 Laporan	50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	7 Laporan	56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	131 Orang			131 Orang	255.591.160,00			-	-	Perangkat Daerah	131 Orang	257.258.895,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	131 Paket			131 Paket	55.591.160,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	131 Paket	57.258.895,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang			40 Orang	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	3 Orang	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan			7 Laporan	1.685.978.509,00			-	-	Perangkat Daerah	7 Laporan	2.251.557.865,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	364.908.900,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	12 Paket	787.856.167,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	245.863.575,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	12 Paket	253.239.482,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket			30 Paket	163.909.050,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	30 Paket	168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	118.545.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	5 Paket	225.101.762,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	163.909.050,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	4 Paket	168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4800 Dokumen			4800 Dokumen	66.088.129,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	4800 Dokumen	68.070.773,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan			10 Laporan	218.545.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	10 Laporan	225.101.762,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan			50 Laporan	344.209.005,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	50 Laporan	354.535.275,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	11 Laporan			3 Laporan	727.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	2 Laporan	318.270.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	318.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	309.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	2 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	185 Unit			75 Unit	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	35 Unit	318.270.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan			1 Laporan	2.155.040.161,00			-	-	Perangkat Daerah	1 Laporan	4.305.071.199,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan			30 Laporan	5.463.635,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	30 Laporan	5.627.544,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			36 Laporan	786.763.440,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	36 Laporan	810.366.343,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Laporan			30 Laporan	139.268.436,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	30 Laporan	168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			5 Laporan	1.223.544.650,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	5 Laporan	3.320.250.990,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	170 Unit			159 Unit	2.652.017.470,00			-	-	Perangkat Daerah	164 Unit	2.962.929.261,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	330 Unit			66 Unit	655.636.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	66 Unit	675.305.286,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	330 Unit			66 Unit	546.363.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	66 Unit	573.681.675,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	185 Unit			45 Unit	32.781.810,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	50 Unit	34.420.901,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			2 Unit	60.099.985,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	2 Unit	63.104.984,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			1 Unit	273.181.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Unit	273.181.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	382.454.450,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Unit	401.577.173,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	455.636.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Unit	688.418.010,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	245.863.575,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Unit	253.239.482,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Laporan Keuangan Daerah	1 Laporan			1 Laporan	157.002.137.788,00						1 Laporan	8.205.159.483,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Laporan			2 Dokumen (Murni dan Perubahan)	2.406.839.680,00			-	-	Perangkat Daerah	1 Laporan	2.891.044.873,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	268.545.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	225.101.762,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	268.545.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	225.101.762,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	223.181.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	281.377.203,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	223.181.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	281.377.203,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	294.209.005,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	354.535.275,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	223.181.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	281.377.203,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen			1 Dokumen	254.988.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	520.138.052,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen			1 Dokumen	317.687.156,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	481.717.771,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	228.682.719,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	184.043.201,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	47 Orang			100 Orang	104.636.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	47 Orang	56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku			5 Jenis Buku	1.675.612.538,00			-	-	Perangkat Daerah	5 Jenis Buku	2.446.880.917,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	163.909.050,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan			1 Laporan	109.272.700,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Laporan	112.550.881,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	47 Dokumen			1 Dokumen	282.017.359,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	47 Dokumen	393.477.880,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	54.636.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen			1 Dokumen	184.585.630,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	190.123.199,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen			1 Dokumen	220.699.895,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	433.320.892,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan			1 Laporan	54.636.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Laporan	56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen			1 Dokumen	54.636.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen			1 Dokumen	242.554.435,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	455.831.068,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen			1 Dokumen	254.028.069,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	467.648.911,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang			150 Orang	54.636.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Orang	56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Buku Laporan Keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	3 Jenis buku Lap.Keuangan			3 Jenis buku Lap.Keuangan	1.624.276.768,00			-	-	Perangkat Daerah	3 Jenis buku Lap.Keuangan	2.085.005.071,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan			36 Laporan	325.086.283,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	36 Laporan	334.838.871,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	34 Dokumen			1 Dokumen	163.909.050,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	34 Dokumen	168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan			18 Laporan	109.272.700,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	18 Laporan	112.550.881,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	9 Laporan			9 Laporan	337.090.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	9 Laporan	450.203.524,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen			1 Dokumen	109.272.700,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	112.550.881,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dokumen			1 Dokumen	114.736.335,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	3 Dokumen	118.178.425,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang			150 Orang	246.363.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Orang	562.754.405,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	14 Lembaga			12 Lembaga	218.545.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	14 Lembaga	225.101.762,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Belanja Keadaan darurat termasuk keperluan Mendesak yang dipenuhi	-			1 Paket	150.535.963.536,00			-	-	Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan			1 Laporan	150.535.963.536,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rekonsiliasi Laporan Penerimaan OPD	3 jenis laporan			3 jenis laporan	759.445.266,00			-	-	Perangkat Daerah	3 jenis laporan	782.228.622,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen			1 Dokumen	379.722.633,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	12 Dokumen	391.114.311,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang			150 Orang	379.722.633,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Orang	391.114.311,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	62.704.618.030,00						1 Dokumen	3.012.033.744,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	62.704.618.030,00			-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.012.033.744,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	109.272.700,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	112.505.881,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	200 Dokumen			1 Dokumen	54.636.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	200 Dokumen	56.272.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	47 Dokumen			1 Dokumen	163.909.050,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	47 Dokumen	168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	54.636.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan			1 Laporan	40.735.897.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Laporan	675.305.286,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan			1 Laporan	54.636.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Laporan	56.272.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	30 Laporan			1 Laporan	20.446.363.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	30 Laporan	562.754.405,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan			1 Laporan	127.818.100,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	3 Laporan	337.652.643,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	630 Laporan			1 Laporan	163.909.050,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	135 Laporan	168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen			1 Dokumen	327.818.100,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	3 Dokumen	337.652.643,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	48 Laporan			1 Laporan	245.067.900,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	48 Laporan	252.419.937,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan			1 Laporan	54.636.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	1 Laporan	56.272.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Orang			150 Orang	166.017.030,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah	4 Orang	170.997.541,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	J U M L A H							265.901.874.444,00						83.815.468.522,00		



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD secara efektif dan efisien. Renja ini mencerminkan komitmen kami dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini memerlukan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Akhir kata, semoga Renja BPKAD Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dan berkontribusi positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Samarinda. Kami terbuka terhadap masukan dan saran konstruktif demi penyempurnaan pelaksanaan Renja ini di masa mendatang.

Terima kasih.